



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

PERHITUNGAN PAGU ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Wali Kota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau yang dilakukan dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERHITUNGAN PAGU ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Kabupaten/Kota Penghasil adalah kabupaten/kota penghasil cukai hasil tembakau dan/atau tembakau di Provinsi Jawa Barat.
6. Kabupaten/Kota Lainnya adalah Kabupaten/Kota yang bukan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau di Provinsi Jawa Barat.

BAB II
PAGU ALOKASI DBHCHT

Pasal 2

Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.401.659.159.000,00 (empat ratus satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Perhitungan DBHCHT Kabupaten/Kota Penghasil Bukan Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan *variable* serta bobot penilaian, sebagai berikut:
 - a. Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2019 diberikan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Rata-rata Produksi Tembakau Tahun 2017 sampai dengan 2019 diberikan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Hasil perhitungan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Lainnya.
- (3) Pembagian DBHCHT sebesar 30% sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota, berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.

BAB III

DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGHASIL TEMBAKAU DAN
CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN DAERAH BUKAN PENGHASIL
TEMBAKAU DAN CUKAI TEMBAKAU

Pasal 4

- (1) Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari:
 - a. Kabupaten Bandung (Penghasil CHT dan Tembakau);
 - b. Kabupaten Bekasi (Penghasil CHT);
 - c. Kabupaten Bogor (Penghasil CHT);
 - d. Kabupaten Ciamis (Penghasil Tembakau);

- e. Kabupaten Cianjur (Penghasil CHT dan Tembakau);
 - f. Kabupaten Cirebon (Penghasil CHT);
 - g. Kabupaten Garut (Penghasil CHT dan Tembakau);
 - h. Kabupaten Indramayu (Penghasil CHT);
 - i. Kabupaten Karawang (Penghasil CHT);
 - j. Kabupaten Kuningan (Penghasil CHT dan Tembakau);
 - k. Kabupaten Majalengka (Penghasil CHT dan Tembakau);
 - l. Kabupaten Subang (Penghasil Tembakau);
 - m. Kabupaten Sumedang (Penghasil CHT dan Tembakau);
 - n. Kabupaten Tasikmalaya (Penghasil CHT dan Tembakau);
 - o. Kota Bandung (Penghasil CHT dan Tembakau);
 - p. Kota Bogor (Penghasil CHT);
 - q. Kota Cirebon (Penghasil CHT);
 - r. Kota Depok (Penghasil CHT);
 - s. Kota Sukabumi (Penghasil CHT);
 - t. Kota Cimahi (Penghasil CHT);
 - u. Kota Tasikmalaya (Penghasil CHT dan Tembakau);
 - v. Kota Banjar (Penghasil CHT);
 - w. Kabupaten Bandung Barat (Penghasil CHT dan Tembakau); dan
 - x. Kabupaten Pangandaran (Penghasil Tembakau).
- (2) Kabupaten/Kota lainnya, terdiri dari :
- a. Kabupaten Purwakarta;
 - b. Kabupaten Sukabumi; dan
 - c. Kota Bekasi.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PAGU ALOKASI DBHCHT

Pasal 5

Penerimaan pagu alokasi DBHCHT merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Penghitungan bobot pagu dan besaran pagu alokasi DBHCHT bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Penetapan hasil perhitungan pagu alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil dan Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 8

Mekanisme penyaluran DBHCHT dilakukan setiap Triwulan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi per Triwulan sebagai berikut:

- a. Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- d. Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

- (1) DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 meliputi:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional yang paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 November 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 92

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 92 Tahun 2020

TANGGAL 13 November 2020

TENTANG : PERHITUNGAN PAGU ALOKASI DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

A. PERHITUNGAN BOBOT PAGU ALOKASI DBHCHT PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kabupaten/Kota Penghasil	Realisasi penerimaan CHT Tahun 2019 (dalam Rp)			Rata-rata produksi tembakau tahun 2017 s.d 2019 (dalam Ton)			Bobot	Total Penghasil
		Realisasi	%	Variabel Pengali	Realisasi	%	Variabel Pengali		
1	2	3	4	5 = (60% * 4)	6	7	8 = (40% * 7)	12 = (5+8+11)	13 = (Pagu Alokasi*12)/100
1	Kabupaten Bandung	8.650.352.000	0,03041	0,01824	1.376,15	18,2163	7,2865	7,3048	29.340.317.020
2	Kabupaten Bekasi	18.644.387.250	0,06553	0,03932	-	-	-	0,0393	157.935.218
3	Kabupaten Bogor	6.162.840.000	0,02166	0,01300	-	-	-	0,0130	52.204.959
4	Kabupaten Ciamis	-	-	-	22,47	0,2975	0,1190	0,1190	477.946.710
5	Kabupaten Cianjur	2.652.758.000	0,00932	0,00559	35,68	0,4723	0,1889	0,1945	781.278.000
6	Kabupaten Cirebon	220.443.600.000	0,77485	0,46491	-	-	-	0,4649	1.867.361.339
7	Kabupaten Garut	3.538.449.900	0,01244	0,00746	2.421,07	32,0480	12,8192	12,8267	51.519.480.636
8	Kabupaten Indramayu	156.960.000	0,00055	0,00033	-	-	-	0,0003	1.329.596
9	Kabupaten Karawang	28.053.126.152.120	98,60597	59,16358	-	-	-	59,1636	237.635.945.088
10	Kabupaten Kuningan	23.256.000	0,00008	0,00005	152,62	2,0202	0,8081	0,8081	3.245.938.634
11	Kabupaten Majalengka	105.840.000	0,00037	0,00022	935,54	12,3839	4,9536	4,9538	19.897.338.860
12	Kabupaten Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kabupaten Subang	-	-	-	16,67	0,2206	0,0882	0,0882	354.454.694
14	Kabupaten Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kabupaten Sumedang	9.635.563.390	0,03387	0,02032	2.409,84	31,8995	12,7598	12,7801	51.332.449.301
16	Kabupaten Tasikmalaya	5.419.760.300	0,01905	0,01143	20,99	0,2779	0,1112	0,1226	492.372.658
17	Kota Bandung	67.077.505.000	0,23578	0,14147	13,96	0,1848	0,0739	0,2154	865.184.877
18	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Bogor	4.507.218.000	0,01584	0,00951	-	-	-	0,0095	38.180.308
20	Kota Cirebon	9.498.403.000	0,03339	0,02003	-	-	-	0,0200	80.460.265
21	Kota Depok	2.279.772.000	0,00801	0,00481	-	-	-	0,0048	19.311.779
22	Kota Sukabumi	289.688.000	0,00102	0,00061	-	-	-	0,0006	2.453.926
23	Kota Cimahi	35.159.652.000	0,12359	0,07415	-	-	-	0,0742	297.834.797
24	Kota Tasikmalaya	16.920.000	0,00006	0,00004	1,83	0,0243	0,0097	0,0097	39.133.344
25	Kota Banjar	1.876.919.000	0,00660	0,00396	-	-	-	0,0040	15.899.241
26	Kabupaten Bandung Barat	457.938.000	0,00161	0,00097	113,90	1,5077	0,6031	0,6041	2.426.222.539
27	Kabupaten Pangandaran	-	-	-	33,77	0,4470	0,1788	0,1788	718.125.210
	JUMLAH	28.449.723.933.960	100,00	60,00	7.554,50	100,00	40,00	100,00	401.659.159.000

B. PERHITUNGAN PAGU ALOKASI DBHCHT PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Kab. Bekasi	Kab. Bogor	Kab. Ciamis	Kab. Cianjur	Kab. Cirebon	Kab. Garut	Kab. Indramayu	Kab. Karawang	Kab. Kuningan
		29,340,317,020	157,935,218	52,204,959	477,946,710	781,278,000	1,867,361,339	51,519,480,636	1,329,596	237,635,945,088	3,245,938,634
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Provinsi Jawa Barat	8,802,095,106	47,380,565	15,661,488	143,384,013	234,383,400	560,208,402	15,455,844,191	398,879	71,290,783,527	973,781,590
2	Kab. Bandung	11,736,126,808	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
3	Kab. Bekasi	338,542,119	63,174,087	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
4	Kab. Bogor	338,542,119	1,822,329	20,881,984	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
5	Kab. Ciamis	338,542,119	1,822,329	602,365	191,178,684	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
6	Kab. Cianjur	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	312,511,200	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
7	Kab. Cirebon	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	746,944,536	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
8	Kab. Garut	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	20,607,792,254	15,341	2,741,953,213	37,453,138
9	Kab. Indramayu	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	531,839	2,741,953,213	37,453,138
10	Kab. Karawang	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	95,054,378,035	37,453,138
11	Kab. Kuningan	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	1,298,375,454
12	Kab. Majalengka	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
13	Kab. Purwakarta	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
14	Kab. Subang	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
15	Kab. Sukabumi	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
16	Kab. Sumedang	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
17	Kab. Tasikmalaya	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
18	Kota Bandung	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
19	Kota Bekasi	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
20	Kota Bogor	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
21	Kota Cirebon	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
22	Kota Depok	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
23	Kota Sukabumi	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
24	Kota Cimahi	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
25	Kota Tasikmalaya	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
26	Kota Banjar	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
27	Kab. Bandung Barat	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
28	Kab. Pangandaran	338,542,119	1,822,329	602,365	5,514,770	9,014,746	21,546,477	594,455,546	15,341	2,741,953,213	37,453,138
	JUMLAH	29,340,317,020	157,935,218	52,204,959	477,946,710	781,278,000	1,867,361,339	51,519,480,636	1,329,596	237,635,945,088	3,245,938,634

No	Kabupaten/Kota	Kab. Majalengka	Kab. Purwakarta	Kab. Subang	Kab. Sukabumi	Kab. Sumedang	Kab. Tasikmalaya	Kota Bandung	Kota Bekasi	Kota Bogor	Kota Cirebon	Kota Depok
		19,897,338,860	-	354,454,694	-	51,332,449,301	492,372,658	865,184,877	-	38,180,308	80,460,265	19,311,779
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Provinsi Jawa Barat	5,969,201,658	-	106,336,408	-	15,399,734,790	147,711,797	259,555,463	-	11,454,093	24,138,080	5,793,534
2	Kab. Bandung	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
3	Kab. Bekasi	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
4	Kab. Bogor	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
5	Kab. Ciamis	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
6	Kab. Cianjur	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
7	Kab. Cirebon	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
8	Kab. Garut	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
9	Kab. Indramayu	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
10	Kab. Karawang	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
11	Kab. Kuningan	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
12	Kab. Majalengka	7,958,935,544	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
13	Kab. Purwakarta	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
14	Kab. Subang	229,584,679	-	141,781,878	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
15	Kab. Sukabumi	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
16	Kab. Sumedang	229,584,679	-	4,089,862	-	20,532,979,720	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
17	Kab. Tasikmalaya	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	196,949,063	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
18	Kota Bandung	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	346,073,951	-	440,542	928,388	222,828
19	Kota Bekasi	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
20	Kota Bogor	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	15,272,123	928,388	222,828
21	Kota Cirebon	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	32,184,106	222,828
22	Kota Depok	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	7,724,712
23	Kota Sukabumi	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
24	Kota Cimahi	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
25	Kota Tasikmalaya	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
26	Kota Banjar	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
27	Kab. Bandung Barat	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
28	Kab. Pangandaran	229,584,679	-	4,089,862	-	592,297,492	5,681,223	9,982,902	-	440,542	928,388	222,828
JUMLAH		19,897,338,860	-	354,454,694	-	51,332,449,301	492,372,658	865,184,877	-	38,180,308	80,460,265	19,311,779

No	Kabupaten/Kota	Kota Sukabumi	Kota Cimahi	Kota Tasikmalaya	Kota Banjar	Kab. Bandung Barat	Kab. Pangandaran	Total
		24	25	26	27	28	29	30
1	Provinsi Jawa Barat	736,178	89,350,439	11,740,003	4,769,772	727,866,762	215,437,563	120,497,747,700
2	Kab. Bandung	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	16,032,113,446
3	Kab. Bekasi	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,695,880,515
4	Kab. Bogor	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,654,808,376
5	Kab. Ciamis	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,820,192,672
6	Kab. Cianjur	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,938,025,212
7	Kab. Cirebon	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	5,359,926,816
8	Kab. Garut	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	24,647,865,466
9	Kab. Indramayu	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,635,045,255
10	Kab. Karawang	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	96,946,953,580
11	Kab. Kuningan	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	5,895,451,073
12	Kab. Majalengka	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	12,363,879,622
13	Kab. Purwakarta	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,634,528,758
14	Kab. Subang	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,772,220,773
15	Kab. Sukabumi	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,634,528,758
16	Kab. Sumedang	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	24,575,210,986
17	Kab. Tasikmalaya	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,825,796,598
18	Kota Bandung	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,970,619,806
19	Kota Bekasi	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,634,528,758
20	Kota Bogor	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,649,360,339
21	Kota Cirebon	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,665,784,476
22	Kota Depok	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,642,030,641
23	Kota Sukabumi	981,570	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,635,482,013
24	Kota Cimahi	28,315	119,133,919	451,539	183,453	27,994,875	8,286,060	4,750,226,121
25	Kota Tasikmalaya	28,315	3,436,555	15,653,338	183,453	27,994,875	8,286,060	4,649,730,557
26	Kota Banjar	28,315	3,436,555	451,539	6,359,696	27,994,875	8,286,060	4,640,705,001
27	Kab. Bandung Barat	28,315	3,436,555	451,539	183,453	970,489,015	8,286,060	5,577,022,898
28	Kab. Pangandaran	28,315	3,436,555	451,539	183,453	27,994,875	287,250,084	4,913,492,782
JUMLAH		2,453,926	297,834,797	39,133,344	15,899,241	2,426,222,539	718,125,210	401,659,159,000

GUBENUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 92 Tahun 2020

TANGGAL : 13 November 2020

TENTNAG : PERHITUNGAN PAGU ALOKASI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

PAGU ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANAJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Pagu Alokasi
1	2	3
1	Provinsi Jawa Barat	120,497,746,000
2	Kabupaten Bandung	16,032,113,000
3	Kabupaten Bekasi	4,695,881,000
4	Kabupaten Bogor	4,654,808,000
5	Kabupaten Ciamis	4,820,193,000
6	Kabupaten Cianjur	4,938,025,000
7	Kabupaten Cirebon	5,359,927,000
8	Kabupaten Garut	24,647,865,000
9	Kabupaten Indramayu	4,635,045,000
10	Kabupaten Karawang	96,946,954,000
11	Kabupaten Kuningan	5,895,451,000
12	Kabupaten Majalengka	12,363,880,000
13	Kabupaten Purwakarta	4,634,529,000
14	Kabupaten Subang	4,772,221,000
15	Kabupaten Sukabumi	4,634,529,000
16	Kabupaten Sumedang	24,575,211,000
17	Kabupaten Tasikmalaya	4,825,797,000
18	Kota Bandung	4,970,620,000
19	Kota Bekasi	4,634,529,000
20	Kota Bogor	4,649,360,000
21	Kota Cirebon	4,665,784,000
22	Kota Depok	4,642,031,000
23	Kota Sukabumi	4,635,482,000
24	Kota Cimahi	4,750,226,000
25	Kota Tasikmalaya	4,649,731,000
26	Kota Banjar	4,640,705,000
27	Kabupaten Bandung Barat	5,577,023,000
28	Kabupaten Pangandaran	4,913,493,000
JUMLAH		401,659,159,000

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL